

Praktek Kepentingan Munculkan Markus

Maraknya kasus hukum terus bergulir mengundang perhatian dari masyarakat. Baru-baru ini yang tengah menjadi perbincangan adalah makelar kasus (markus). Pro dan kontra memberikan warna tersendiri bagi kasus yang diungkap ke media oleh mantan kabareskrim Polri, komjen(PoL) Susno Doadji. Bukan 'barang baru' sebenarnya, namun markus seringkali terjadi di kehidupan kita. Sadar atau tidak sadar beberapa orang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Wisnu Dewanto, SH.,LL.M selaku dosen tetap FH Ubaya memberikan pandangannya.

'Makelar kasus bisa disebut juga melobi agar yang terkena kasus mendapat sanksi yang ringan. Lebih umumnya seperti calo, dengan mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk menyelesaikan perkara,'terang pria berkumis ini. Lebih lanjut Wisnu menjelaskan bahwa, 'Markus sulit dideteksi karena sifatnya tidak tersentuh dan tidak kelihatan.' Untuk itu, jika menunjuk dalangnya akan sulit karena melibatkan banyak pihak. 'Yaitu pihak pertama, pihak kedua dan pihak ketiga. Untuk pihak ketiga bisa jadi pengacara yang ditunjuk atau orang-orang yang memiliki hubungan dengan pihak kedua atau lembaga penegak hukum yang menangani kasus,' jelasnya. Sehingga, markus sampai saat ini terus bergulir. Ketika uang bermain maka kita akan menjadi mafia hukum.

'Penyebab utama markus adalah praktek kepentingan. Seharusnya praktek dan kepentingan sama, karena dalam praktek ada kepentingan maka menjadi berbeda,' Ungkap mahasiswa S3 FH UGM ini. Tak dapat dipungkiri bahwa kepentingan pribadi menjadi landasan seseorang untuk terlibat sebagai mafia hukum. Pelaksanaan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu perlu dilakukan untuk memerangi makelar kasus. Namun, yang terpenting adalah kerjasama masyarakat dan aparat hukum yang solid sebagai cerminan pondasi hukum yang adil dan beradab. ' Sebenarnya pemberantasan markus dapat diawali lembaga penegak hukum yang harus intropeksi,' tutur pria asal Banyuwangi ini. (zha/wu)